

---

## Penerapan Pola Peran Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Desa Melalui Sistem Informasi Manajemen

<sup>1</sup>Septony Siahaan, <sup>2</sup>Dompok Pasaribu, <sup>3</sup>Wesly Andri Simanjuntak,  
<sup>4</sup>Sunday Ade Sitorus

<sup>1,2\*,3</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Manajemen, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

<sup>1</sup>valen250315@gmail.com, <sup>2\*</sup>yoh022002@yahoo.com, <sup>3</sup>wesly.juntak@yahoo.com,  
<sup>4</sup>sundaysitorus@uhn.ac.id

### *Abstract*

This service aims to implement a Management Information System (SIM) to improve the efficiency of village administration management, accelerate public services, and increase transparency in Sei Mencirim Village. This program also aims to improve the digital literacy of village officials to be able to utilize technology in managing village administration. This activity is carried out through socialization, technical training, and mentoring of village officials in using SIM. Socialization aims to provide a basic understanding of SIM, while technical training includes simulations of using SIM software and managing village administration data. The final stage is mentoring to ensure the SIM can operate optimally. The implementation of the SIM has improved the efficiency of village administration management, accelerated public services, and increased transparency of village budgets. The community felt the direct benefits in the form of faster document processing time, as well as increased transparency in budget use. Village officials can access and manage data in real-time, accelerating the decision-making process. The main challenges in implementing the SIM include limited technological infrastructure and low digital literacy of village officials. However, the training provided has improved the ability of village officials to manage administration better. The program is also credited with reducing administrative errors that are common in manual systems. However, strengthening the infrastructure and increasing the capacity of village officials are needed to optimize the operation of the SIM. The implementation of SIM in Sei Mencirim Village has brought positive impacts in the form of increased administrative efficiency and public services. Although there are still challenges such as limited infrastructure and digital literacy, this program can be used as a model for implementing technology in other villages. With the support of the local government, this program is expected to improve community welfare and encourage transparency in village management.

**Kata Kunci:** management information system (sim), village administration management, public service efficiency, budget transparency, digital literacy

### **Abstrak**

Pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi desa, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi di Desa Sei Mencirim. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perangkat desa agar mampu memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan administrasi desa. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan perangkat desa dalam menggunakan SIM. Sosialisasi

---

bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai SIM, sementara pelatihan teknis mencakup simulasi penggunaan perangkat lunak SIM dan pengelolaan data administrasi desa. Tahap akhir berupa pendampingan untuk memastikan SIM dapat beroperasi dengan optimal. Penerapan SIM berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi desa, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi anggaran desa. Masyarakat merasakan manfaat langsung berupa waktu pengurusan dokumen yang lebih cepat, serta peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran. Perangkat desa dapat mengakses dan mengelola data secara real-time, mempercepat proses pengambilan keputusan. Tantangan utama dalam implementasi SIM meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital perangkat desa. Meski demikian, pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi secara lebih baik. Program ini juga diakui mampu mengurangi kesalahan administrasi yang umum terjadi dalam sistem manual. Namun, diperlukan penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas perangkat desa agar SIM dapat dioperasikan lebih optimal. Penerapan SIM di Desa Sei Mencirim membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. Meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, program ini dapat dijadikan model penerapan teknologi di desa-desa lain. Dengan dukungan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong transparansi dalam pengelolaan desa

**Kata Kunci:** sistem informasi manajemen (sim), pengelolaan administrasi desa, efisiensi pelayanan publik, transparansi anggaran, literasi digital

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Desa Sei Mencirim di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Namun, seperti banyak desa di Indonesia, desa ini menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan informasi dan administrasi yang efisien. Sistem informasi yang ada di desa masih menggunakan metode manual, sehingga seringkali terjadi kendala dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Pengelolaan administrasi desa yang masih konvensional juga menyebabkan lambatnya aliran informasi antar perangkat desa dan masyarakat. Hal ini berdampak pada pelayanan publik yang kurang optimal dan penyampaian informasi yang tidak selalu tepat waktu. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat yang difokuskan pada penerapan sistem informasi manajemen menjadi solusi yang relevan.

Peran sistem informasi manajemen (SIM) dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi desa sangat penting. Melalui implementasi SIM, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan menggunakan

---

teknologi ini, berbagai informasi penting seperti data kependudukan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran dapat diakses dan dikelola secara efisien. Dalam hal ini, desa Sei Mencirim dapat memanfaatkan SIM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen di desa Sei Mencirim, sehingga mampu mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan desa.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perangkat desa. Literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan dapat dioperasikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam era digital seperti saat ini, kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi menjadi kunci sukses dalam berbagai aspek, termasuk pemerintahan desa. Pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas perangkat desa dalam menggunakan sistem informasi diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif. Melalui pelatihan dan pendampingan, perangkat desa akan mampu mengelola informasi desa dengan lebih baik dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Desa Sei Mencirim dimulai dari ketidakmampuan desa dalam mengelola informasi dengan efisien. Administrasi desa masih dilakukan secara manual, di mana semua catatan disimpan dalam bentuk dokumen fisik, yang sering kali menyebabkan kesulitan dalam pencarian informasi ketika dibutuhkan. Proses pengelolaan data yang lambat ini mempengaruhi berbagai aspek pelayanan publik, seperti pengurusan surat menyurat, pengelolaan data kependudukan, hingga perencanaan pembangunan. Sistem manual ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Keterbatasan teknologi informasi merupakan permasalahan yang sangat umum di desa ini. Desa Sei Mencirim belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi SIM yang optimal. Ketersediaan komputer yang sangat terbatas dan jaringan internet yang sering kali tidak stabil menjadi kendala utama dalam pengelolaan sistem informasi. Hal ini menyebabkan perangkat desa tidak memiliki akses yang cepat dan tepat waktu terhadap data yang mereka butuhkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Akibatnya, proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien, terutama ketika harus

---

berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau lembaga lain yang lebih besar. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang teknologi informasi juga menjadi tantangan besar bagi perangkat desa di Sei Mencirim. Banyak perangkat desa yang tidak memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan komputer dan perangkat lunak manajemen informasi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan perangkat desa, yang sebagian besar belum pernah mendapatkan pelatihan formal terkait teknologi informasi. Ketidakmampuan ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menggunakan perangkat SIM, yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik di desa. Masalah khusus terkait pengelolaan data kependudukan sangat terasa di Desa Sei Mencirim, di mana data kependudukan sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala. SIM yang seharusnya membantu memperbarui dan mengelola data kependudukan secara real-time tidak dapat diterapkan dengan baik karena proses pencatatan masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan banyak warga desa tidak terdata dengan benar, terutama dalam hal pengurusan KTP, KK, dan administrasi lainnya. Ketidakakuratan data ini juga berdampak pada perencanaan pembangunan desa yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. SIM seharusnya dapat digunakan untuk melacak pengeluaran dan pemasukan anggaran desa secara lebih transparan, tetapi karena sistem ini belum diterapkan dengan baik, masyarakat desa sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana anggaran digunakan. Kurangnya transparansi ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa, yang berpotensi memicu konflik internal. SIM yang optimal dapat membantu mempublikasikan laporan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Dalam hal pelayanan publik, Desa Sei Mencirim juga menghadapi tantangan besar karena sistem administrasi yang masih konvensional. Pengurusan surat-surat penting, seperti surat keterangan domisili atau surat izin usaha, sering kali memakan waktu lama karena tidak ada SIM yang dapat mempercepat proses tersebut. Hal ini berdampak langsung pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. SIM yang terintegrasi dapat membantu memproses pengajuan surat secara digital dan mengurangi waktu tunggu bagi

---

masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga. Permasalahan pengarsipan dan penyimpanan dokumen juga menjadi isu khusus yang sering dihadapi oleh Desa Sei Mencirim. Seluruh dokumen penting desa, termasuk data kependudukan, laporan keuangan, dan perencanaan pembangunan, disimpan dalam bentuk fisik tanpa ada backup digital. Kondisi ini sangat rentan terhadap kehilangan atau kerusakan dokumen, baik karena bencana alam maupun kelalaian manusia. SIM dapat membantu menyimpan semua data secara elektronik dengan backup yang aman, sehingga memudahkan akses dan menjaga keamanan data dalam jangka panjang. Namun, kurangnya pemahaman dan infrastruktur teknologi membuat desa ini belum dapat mengimplementasikan sistem tersebut dengan baik. Masalah koordinasi antara perangkat desa juga menjadi tantangan besar dalam penerapan SIM di Desa Sei Mencirim. Koordinasi antar perangkat desa, terutama dalam hal pengelolaan data dan informasi, masih sangat terbatas karena tidak adanya sistem yang terintegrasi. Setiap perangkat desa bekerja secara terpisah dengan informasi yang tidak selalu sinkron satu sama lain. Hal ini sering kali menyebabkan miskomunikasi dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang penting bagi desa. Dengan SIM yang terintegrasi, semua perangkat desa dapat mengakses data yang sama dan berkoordinasi dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan efisiensi operasional desa secara keseluruhan. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu penyebab lambannya penerapan SIM di Desa Sei Mencirim. Meski pemerintah pusat telah mendorong digitalisasi administrasi desa, implementasi di tingkat daerah masih sangat terbatas. Desa Sei Mencirim belum mendapatkan alokasi dana khusus untuk pengadaan infrastruktur teknologi yang diperlukan dalam implementasi SIM. Selain itu, perangkat desa juga tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dari pemerintah daerah dalam hal pengoperasian SIM. Kurangnya dukungan ini menyebabkan desa tertinggal dalam upaya digitalisasi administrasi, meskipun potensinya sangat besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam sistem informasi desa juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebagian besar masyarakat Desa Sei Mencirim belum memiliki akses yang cukup terhadap informasi desa, karena sistem informasi yang ada tidak dapat memberikan data yang akurat dan terkini. Masyarakat tidak mendapatkan informasi

---

yang cukup terkait dengan program-program pemerintah desa, alokasi anggaran, ataupun rencana pembangunan desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam sistem informasi desa ini membuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan juga menjadi rendah. SIM yang efektif dapat menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses. Masalah pelaporan dan evaluasi program desa juga merupakan permasalahan yang terkait erat dengan kurangnya penerapan SIM di Desa Sei Mencirim. Setiap program pembangunan desa memerlukan pelaporan dan evaluasi yang tepat waktu untuk memastikan efektivitasnya. Namun, karena sistem pelaporan masih dilakukan secara manual, banyak laporan yang terlambat atau tidak akurat. Evaluasi program menjadi sulit dilakukan tanpa adanya data yang terstruktur dan terintegrasi. SIM dapat membantu mengotomatisasi proses pelaporan dan evaluasi, sehingga pemerintah desa dapat memantau progres program secara real-time dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ketidakmampuan desa untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan juga menjadi masalah khusus di Desa Sei Mencirim. Data yang ada sering kali tidak diolah dan dianalisis dengan baik, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sering kali tidak berbasis data yang akurat. SIM seharusnya dapat membantu dalam pengelolaan dan analisis data untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran. Namun, tanpa adanya pelatihan dan infrastruktur yang memadai, desa ini belum dapat memanfaatkan data secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Sistem Informasi Manajemen (SIM)**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan perangkat penting dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat (Indrawati, 2021). Dalam lingkungan publik, SIM membantu mempermudah koordinasi antarunit serta memastikan efisiensi operasional melalui integrasi data yang terkonsolidasi (Nurhadi & Kusuma, 2022). Sistem ini memungkinkan para pengambil keputusan mengakses data secara real-time sehingga mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat (Santoso et al., 2023). Selain itu, SIM yang baik turut mendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah dengan

---

menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Yusuf & Anwar, 2024). Studi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan SIM secara optimal mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan (Mustafa & Dewi, 2020). Namun, penerapan SIM seringkali dihadapkan pada tantangan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya keterampilan digital (Pratama et al., 2021). Dukungan dari pemerintah dan pelatihan berkelanjutan bagi staf menjadi hal penting untuk memastikan pemanfaatan SIM yang efektif (Setiawan, 2023). Teknologi pendukung seperti cloud computing juga telah digunakan untuk meningkatkan keamanan data dan mempermudah akses di berbagai lokasi (Widiastuti & Hartanto, 2022). Dengan adanya SIM yang terstruktur, berbagai proses operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan organisasi (Hadi & Rachman, 2024). SIM juga memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Arifin, 2024).

## **2. Pengelolaan Administrasi Desa**

Pengelolaan administrasi desa yang efisien merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal (Sari & Hakim, 2021). Sistem administrasi yang baik membantu desa dalam mengelola data penduduk, aset, dan sumber daya secara lebih terstruktur dan akurat (Utami et al., 2022). Di beberapa daerah, pemerintah mulai menerapkan sistem administrasi digital yang memudahkan proses pendataan dan pengarsipan (Rahman & Susanto, 2024). Melalui digitalisasi, desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan (Lestari, 2020). Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi sering menjadi kendala dalam implementasi sistem administrasi berbasis digital (Fauzi & Ahmad, 2021). Oleh sebab itu, pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan agar perangkat desa dapat mengoperasikan sistem dengan optimal (Wijaya, 2023). Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah berperan penting untuk mendukung proses pengelolaan administrasi desa yang berkelanjutan (Nugroho & Mulyadi, 2022). Dengan pengelolaan administrasi yang efisien, desa tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Arifin, 2024). Hal ini

---

menciptakan lingkungan yang lebih partisipatif di mana masyarakat dapat turut mengawasi dan berkontribusi dalam program pembangunan desa (Santoso, 2023).

### **3. Efisiensi Pelayanan Publik**

Efisiensi dalam pelayanan publik adalah aspek penting yang menentukan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat (Hakim & Setiawan, 2021). Pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dengan mengintegrasikan teknologi informasi, seperti e-government, yang memudahkan akses dan mempercepat proses pelayanan (Dewi & Prasetya, 2022). Dengan e-government, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga mengurangi waktu dan biaya (Yuniarti et al., 2023). Salah satu penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dapat menghemat biaya operasional hingga 20-30% (Firdaus, 2020). Namun, investasi awal yang besar dalam hal infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus dihadapi (Amalia & Setiadi, 2021). Efisiensi pelayanan publik juga sangat bergantung pada literasi digital masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital dengan optimal (Kurniawati et al., 2022). Pemerintah terus berupaya meningkatkan literasi digital dengan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Subekti, 2023). Dengan efisiensi yang meningkat, diharapkan kualitas pelayanan publik juga semakin baik, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif (Hasanah, 2024). Di era digital ini, efisiensi pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat (Rahmawati, 2024).

### **4. Transparansi Anggaran**

Transparansi anggaran menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Saputra & Aziz, 2021). Pemerintah yang transparan dalam anggaran menunjukkan komitmen dalam menggunakan dana publik secara bertanggung jawab dan terbuka (Yulia & Hendrawan, 2022). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dan memantau alokasi dana untuk program-program pemerintah (Kusumawati et al., 2023). Salah satu cara yang umum digunakan untuk meningkatkan

---

transparansi adalah melalui publikasi laporan anggaran secara berkala di platform digital pemerintah (Agustina & Rahardjo, 2024). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan mengurangi potensi korupsi (Lestari, 2020). Namun, tantangan utama dalam implementasi transparansi anggaran adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami laporan anggaran (Prabowo & Handoko, 2021). Untuk itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan agar dapat lebih memahami dan memantau anggaran secara efektif (Ardana, 2023). Transparansi anggaran juga membutuhkan komitmen dari seluruh level pemerintahan untuk melaporkan pengeluaran secara akurat dan tepat waktu (Santoso & Wijaya, 2022). Transparansi anggaran, dengan demikian, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rahmawati, 2024).

## **5. Literasi Digital**

Literasi digital menjadi keterampilan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat di era digitalisasi saat ini (Sari & Putra, 2021). Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah dan memanfaatkan layanan publik secara lebih optimal (Aditya et al., 2022). Literasi digital juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah (Handayani, 2023). Selain itu, literasi digital yang tinggi dapat membantu masyarakat dalam mengenali informasi yang salah dan menghindari penyebaran hoaks (Fauziah & Rachman, 2024). Pengembangan literasi digital memerlukan dukungan dari pemerintah melalui program pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur (Kartika & Susilo, 2020). Meski demikian, keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet di beberapa wilayah masih menjadi tantangan dalam pemerataan literasi digital (Wijaya et al., 2021). Literasi digital yang baik juga mendukung masyarakat untuk lebih mudah beradaptasi dengan berbagai inovasi teknologi dalam pelayanan publik (Kurniawan & Setiawan, 2022). Program literasi digital ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih melek teknologi dan siap menghadapi tantangan di era digital (Nugraha, 2023). Secara keseluruhan, literasi digital bukan hanya bermanfaat bagi individu tetapi

---

juga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat (Santoso, 2024).

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat di desa Sei Mencirim. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah partisipatif, di mana perangkat desa dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

1. Pertama, dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan SIM dalam pengelolaan administrasi desa. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan antara tim pengabdian dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai manfaat SIM dan bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Tahap kedua adalah pelatihan teknis bagi perangkat desa. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat lunak SIM, pengelolaan data kependudukan, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan. Pelatihan ini dilakukan dalam beberapa sesi yang dibagi berdasarkan bidang administrasi yang akan dikelola. Setiap sesi pelatihan melibatkan simulasi penggunaan SIM, sehingga perangkat desa dapat langsung mempraktikkan materi yang diberikan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan SIM dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas mereka.
3. Tahap ketiga adalah pendampingan dalam implementasi SIM. Setelah pelatihan, tim pengabdian melakukan pendampingan intensif kepada perangkat desa dalam menerapkan SIM di berbagai aspek pengelolaan desa. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat desa dapat menggunakan SIM dengan baik dan mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Selain itu, pendampingan juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan desa dan dapat berfungsi secara optimal. Selama tahap pendampingan,

---

dilakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penerapan SIM dan melakukan perbaikan jika diperlukan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan SIM di desa Sei Mencirim memberikan berbagai dampak positif, baik dari segi efisiensi administrasi maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi, perangkat desa yang sebelumnya kesulitan dalam mengelola data kependudukan dan anggaran kini dapat melakukannya dengan lebih cepat dan akurat. SIM memungkinkan perangkat desa untuk mengakses dan mengelola data secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik. Salah satu perangkat desa yang terlibat dalam program ini menyatakan bahwa SIM sangat membantu dalam mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi sebelumnya. Dari sisi pelayanan publik, masyarakat desa juga merasakan manfaat dari penerapan SIM. Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan administrasi desa, seperti pembuatan surat keterangan atau pengurusan izin, menjadi lebih singkat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran desa juga meningkat, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Zheng et al. (2019) yang menunjukkan bahwa SIM dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Namun, implementasi SIM juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di desa, seperti jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini dapat menghambat akses ke sistem dan mengganggu kelancaran operasional SIM. Selain itu, literasi digital perangkat desa yang masih rendah menjadi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan SIM. Beberapa perangkat desa membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat memahami dan mengoperasikan sistem dengan baik. Oleh karena itu, program penguatan literasi digital bagi perangkat desa perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

## **KESIMPULAN**

---

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Sei Mencirim dengan fokus pada penerapan sistem informasi manajemen telah memberikan dampak positif yang signifikan. Implementasi SIM terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi desa dan kualitas pelayanan publik. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, perangkat desa kini lebih mampu mengelola data secara akurat dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital perangkat desa yang masih perlu ditingkatkan. Untuk ke depannya, program pengabdian ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Deli Serdang yang ingin menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi desa. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas perangkat desa, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi SIM juga dapat menjadi langkah awal menuju desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Desa Sei Mencirim, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai. Selain itu, program pelatihan lanjutan tentang literasi digital perlu diadakan secara berkelanjutan untuk memastikan perangkat desa mampu mengoperasikan sistem dengan optimal. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan berupa alokasi dana khusus dan pendampingan teknis. Partisipasi masyarakat dalam sistem informasi desa perlu ditingkatkan dengan memberikan akses yang lebih transparan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, R., et al. (2022). "Digital Literacy in Public Services: Enhancing Accessibility and Inclusivity." *Journal of Digital Society and Public Administration*, 11(3), 215-228.

- 
- Agustina, L., & Rahardjo, F. (2024). "Public Financial Transparency Through Digital Platforms: A Case Study." *International Journal of Public Governance*, 19(1), 90-105.
- Amalia, S., & Setiadi, R. (2021). "Challenges and Opportunities in E-Government Implementation for Efficiency." *Journal of Public Administration and Management*, 13(2), 154-170.
- Ardana, W. (2023). "Promoting Financial Literacy to Support Budget Transparency." *Journal of Public Policy and Financial Accountability*, 14(1), 89-98.
- Arifin, M. (2024). "The Role of Village Administration in Improving Public Services." *Indonesian Journal of Local Government*, 8(2), 203-217.
- Bhatnagar, S. (2020). "The Role of E-Government in Rural Development: Challenges and Success Stories." *Journal of Public Administration*, 19(4), 283-299.
- Bhatnagar, S. (2021). *E-Government: From Vision to Implementation* (2nd ed.). Sage Publications.
- Davis, G. B., & Olson, M. H. (2017). "Public Sector Information Systems: Challenges and Strategies for Implementation." *International Journal of Public Administration*, 23(2), 113-128.
- Dewi, I., & Prasetya, L. (2022). "Increasing Efficiency in Public Services through Information Technology." *Journal of Public Efficiency*, 10(4), 292-308.
- Fauzi, H., & Ahmad, S. (2021). "Digital Administration in Village Management: Challenges and Prospects." *Village and Regional Development Review*, 5(1), 88-103.
- Fauziah, N., & Rachman, T. (2024). "Digital Literacy as a Countermeasure Against Misinformation." *Journal of Digital Literacy and Society*, 7(3), 156-169.
- Firdaus, R. (2020). "Cost Efficiency in Public Service Delivery: The Impact of E-Government." *Journal of Public Sector Economics*, 12(1), 47-62.
- Hadi, P., & Rachman, Y. (2024). "Enhancing Decision-Making through Management Information Systems." *Management Science Journal*, 18(3), 150-166.
- Hakim, A., & Setiawan, I. (2021). "Efficiency in Public Service: A Review of E-Government Practices." *Public Services and Administration Journal*, 13(2), 135-150.

- 
- Handayani, L. (2023). "Digital Transformation in Village Administration Management." *Journal of Rural Development*, 9(1), 120-135.
- Heeks, R. (2019). "Developing E-Government Strategies: A Case Study of ICTs in Rural Governance." *Information Society Journal*, 15(3), 23-38.
- Heeks, R., & Duncombe, R. (2019). "Understanding the Challenges of ICT Implementation in Low-Income Countries." *Journal of Information Technology for Development*, 25(1), 12-29.
- Indrawati, S. (2021). "Framework for Management Information Systems in Public Organizations." *Journal of Information Systems Management*, 9(4), 211-225.
- Kartika, T., & Susilo, A. (2020). "Promoting Digital Literacy for an Informed Society." *Journal of Digital Literacy*, 6(2), 98-112.
- Kurniawati, D., et al. (2022). "Public Readiness for Digital Public Services." *Journal of Community Development*, 12(2), 75-89.
- Kusumawati, M., et al. (2023). "Budget Transparency in Local Government." *Journal of Public Budgeting*, 15(2), 118-134.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). *Essentials of Management Information Systems* (12th ed.). Pearson.
- Lestari, A. (2020). "Enhancing Budget Transparency Through Public Access to Information." *Journal of Transparency and Accountability*, 10(1), 45-57.
- Mustafa, F., & Dewi, E. (2020). "Challenges in Implementing Management Information Systems." *Journal of Management and Technology*, 12(3), 98-112.
- Nugraha, S. (2023). "Developing Digital Literacy in Rural Areas." *Journal of Digital Literacy and Development*, 8(2), 200-213.
- Nugroho, B., & Mulyadi, T. (2022). "The Role of Government in Supporting Village Administration." *Regional Administration Journal*, 13(4), 176-192.
- Prabowo, H., & Handoko, D. (2021). "Financial Literacy as a Foundation for Budget Transparency." *Journal of Financial Education and Accountability*, 9(2), 55-70.
- Pratama, I., et al. (2021). "Management Information Systems and Organizational Efficiency." *International Journal of Information Systems*, 16(1), 60-74.

- 
- Purbo, O. W. (2019). "Enhancing Public Service Efficiency through ICT: A Case Study of Village Information Systems in Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi untuk Pembangunan*, 8(3), 79-92.
- Purbo, O. W. (2020). "Digital Transformation in Rural Governance: The Role of E-Government and ICT." *Jurnal Teknologi Desa*, 11(1), 52-68.
- Purbo, O. W. (2021). "Sistem Informasi Manajemen untuk Desa: Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Layanan Publik." *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, 10(1), 98-112.
- Rahman, N., & Susanto, D. (2024). "Digitizing Village Administration for Better Service Delivery." *Journal of E-Government Studies*, 9(2), 130-145.
- Rahmawati, A. (2024). "Building Trust Through Budget Transparency." *Journal of Public Accountability*, 14(1), 70-85.
- Santoso, A., & Wijaya, P. (2022). "The Commitment of Local Governments to Budget Transparency." *Journal of Public Administration*, 12(3), 185-200.
- Santoso, R., et al. (2023). "Real-Time Data in Decision-Making with Management Information Systems." *Journal of Systems and Management*, 14(4), 289-305.
- Saputra, R., & Aziz, M. (2021). "The Importance of Budget Transparency for Government Accountability." *Journal of Public Financial Management*, 10(3), 98-112.
- Sari, A., & Hakim, R. (2021). "Effective Village Administration for Enhanced Service Quality." *Village and Community Journal*, 7(2), 135-150.
- Sari, Y., & Putra, D. (2021). "Understanding Digital Literacy in Society." *Journal of Digital Education*, 9(2), 118-132.
- Setiawan, J. (2023). "The Role of Cloud Computing in Management Information Systems." *Journal of Information Technology Management*, 11(3), 220-235.
- Subekti, L. (2023). "Public Service Efficiency Through Digital Solutions." *Journal of Government Efficiency*, 8(1), 145-160.
- Utami, H., et al. (2022). "The Role of Structured Village Administration." *Journal of Local Administration Studies*, 11(3), 180-195.
- Widiastuti, N., & Hartanto, Y. (2022). "Ensuring Data Security in Management Information Systems." *Journal of Data and Information Security*, 13(2), 198-214.

- 
- Wijaya, H., & Hardianto, E. (2024). "Public Service Transformation through E-Government." *Journal of Public Sector Innovation*, 15(1), 99-113.
- Wijaya, K., et al. (2021). "Barriers to Digital Literacy in Rural Areas." *Journal of Digital Transformation*, 7(3), 158-170.
- Yulia, P., & Hendrawan, A. (2022). "Transparency in Budget Allocation: Impacts on Public Trust." *Journal of Public Budgeting and Finance*, 8(4), 145-160.
- Yuniarti, R., et al. (2023). "The Impact of E-Government on Public Service Efficiency." *Journal of Public Service and Administration*, 12(2), 123-140.
- Yusuf, A., & Anwar, L. (2024). "Accountability and Transparency in Public Organizations with SIM." *Journal of Public Systems Management*, 17(2), 110-126.
- Zheng, Y., & Stahl, B. C. (2019). "A Critical Analysis of the Concept of Transparency in Information Systems." *Journal of Information Technology*, 34(4), 356-374.
- Zheng, Y., Heeks, R., & Arun, S. (2019). "Social Inclusion through Digital Technologies: A Comparative Analysis." *Information Systems Journal*, 29(2), 235-257.